

**ANALISIS KINERJA EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN MUARA ENIM (KOTA INDUK) DENGAN KOTA PRABUMULIH  
(KOTA BARU )**

ANNA YULIANITA

*Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya,  
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia*

ABSTRACT

*The title of this research is "The Analysis of some Potencies of the Sectors in Economy of Muara Enim Regent. It is intended to identify what sectors in the economy of Muara Enim Regent that can be developed during the year 2001 to 2008.*

*The data used in this research is the secondary data from sources. Those data are analysed by using the descriptive and quantitative technic. The quantitative analysis use Location Quotient (LQ) calculation method and Shift Share analysis.*

*The result based on the first method indicates that there are some sectors that can be considered as primary sectors, and this showed by the value of  $LQ > 1$ , namely the mining sectors, farm food crops subsector, forestry subsector, electricity subsector, and railways transport subsector. The result based on the Shift Share analysis shows a little bit different from the first one, where the primary sectors are: the agriculture sectors, the mining sectors, the manufacturing sectors, and the construction sectors, where all its coefficient have positive value. Point elasticity is 5,64 which means that one percent riel sector that had positively effects 5,64 percent on services sector. All those sectors expected to help develop the economy of Muara Enim Regent as a whole.*

*Keyword : Primary sector, Location Quotient, Shift Share, Muara Enim*

---

**PENDAHULUAN**

Kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah ini dibuktikan dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sejalan dengan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kewenangan dalam pengurusan daerah yang luas, memberikan peluang kepada daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan wilayah, pembinaan terhadap sosial ekonomi dan sumber daya yang intensif dan optimal serta diikuti penyusunan skala prioritas pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Salah satu yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dalam menggerakkan perekonomian daerah adalah dengan jalan mengelola serta

mengembangkan pembangunan di wilayahnya sendiri, salah satunya pemekaran kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 oleh pemerintah pusat mengenai pemekaran wilayah termasuk persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pemekaran wilayah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Kecenderungan laju pemekaran daerah saat ini perlu dukungan sistem kendali yang andal karena dikawatirkan dapat menjadi faktor pemicu disintegrasi. Pemekaran daerah dalam kerangka konsep otonomi tidak dapat dilepaskan dari esensi dan prinsip desentralisasi. Menurut Simon (1996), prinsip desentralisasi mensyaratkan adanya dukungan pembiayaan yang lebih besar dibanding sistem sentralisasi. Di samping itu, dalam sistem desentralisasi diperlukan sistem kendali dari pemerintah pusat yang dilakukan secara ketat. Dwiyanto (2003) menjelaskan berbagai kelemahan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berdasarkan hasil observasi pada awal implementasinya di Indonesia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pemekaran daerah akan menghadapi masalah bagaimana menetapkan garis batas antar dua sistem wilayah. Menurut Haggett (2001) batas territory antar Negara di dunia dapat merupakan garis batas daerah aliran sungai (DAS), garis median yang membagi permukaan sungai dan danau maupun laut dan, dapat merupakan garis semu berdasarkan koordinat lintang dan bujur.

Salah satu kabupaten/kota baru yang merupakan pemekaran dari kabupaten Muara Enim adalah Kota Prabumulih. Sebagai daerah otonom yang relatif baru dimana Prabumulih ini merupakan kota baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001. dengan terbentuknya Kota Prabumulih diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menggali dan mengembangkan segala aspek yang berpotensi guna menunjang laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan pertimbangan pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan umumnya dan khususnya di Kota Prabumulih yang diperkuat dengan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana kinerja ekonomi yang terjadi di Kota Prabumulih sesudah pemekaran ?; dan 2) Bagaimana perbandingan kinerja ekonomi daerah Prabumulih setelah dilakukan pemekaran dengan Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten Induk ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam PP tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP 129/2000). Argumentasi untuk ini didasarkan atas

beberapa dimensi. Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah.

Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Pemekaran daerah menghasilkan tren baru dalam struktur kewilayahan di Indonesia.

Sejak Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, telah terbentuk 363 Kabupaten dan 93 Kota dan 33 Provinsi ( Tidak termasuk 5 Kotamadya dan 1 Kabupaten). Hasil Evaluasi awal terhadap beberapa daerah Otonom Baru, hanya sebagian kecil daerah yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagian daerah Otonom baru lainnya masih menghadapi permasalahan mendasar seperti : keterbatasan pembiayaan, penetapan batasan wilayah, Rencana Tata Ruang, penyerahan asset dan kedudukan ibukota.

Implikasi dari pemekaran wilayah antara lain menimbulkan konsekuensi negatif, yaitu terjadinya inefisiensi administrasi karena biaya penyelenggaraan pemerintahan meningkat luar biasa, kemerosotan kapasitas penyelenggaraan fungsi-fungsi dasar yang menjadi kewajiban semua kabupaten/kota, peningkatan parokialisme dan potensi konflik antar kelompok (etnik agama) yang dimanipulasi oleh elit tradisional lokal.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun oleh Departemen Dalam Negeri, animo masyarakat (kelompok tertentu) untuk membentuk daerah otonom baru relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data usulan pembentukan daerah otonom hingga saat ini (Januari 2007) sebanyak 21 usulan pembentukan Provinsi dan 110 usulan pembentukan Kabupaten/ Kota. Dari jumlah tersebut terdapat 16 calon Kabupaten/ Kota yang sudah dibahas dalam sidang DPOD, dan selebihnya ditunda pembahasannya menunggu penyelesaian PP Pengganti PP 129 tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan daerah. Kelemahan mendasar dari PP ini adalah menggunakan "*sistem agregat*" (tanpa ada komponen yang mempunyai bobot tertentu baik bobot teknis maupun bobot administratif) dalam menentukan kelayakan pembentukan daerah otonom baru.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah dapat dihapuskan dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut penyempurnaan PP nomor 129 tahun 2000, maka pemerintah mengeluarkan PP nomor 78 tahun 2007. Terdapat beberapa perubahan dalam komponen indikator penentu layak tidaknya suatu daerah untuk dimekarkan antara PP nomor 129 tahun 2000 dengan PP nomor 78 tahun 2007. Aspek-aspek yang dipersyaratkan oleh PP nomor 129 tahun 2000, yang meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan variabel lain, sedangkan PP nomor 78 tahun 2007, yang meliputi: kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali

Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur. Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas dan nama wilayah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal. Perubahan-perubahan tersebut, meski secara de jure telah diatur berdasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak semudah membalikkan tangan, lepasnya daerah baru dari daerah lama, berarti pula adanya gradasi otoritas, pengurangan anggaran belanja, penurunan penerimaan dan pendapatan, disamping satu hal yang sudah pasti adalah berkurangnya luas wilayah. Hal

ini apabila tidak diperhatikan secara seksama dalam proses pembentukan daerah otonom baru berpotensi akan memicu konflik lintas daerah, sehingga menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah

### **Konsep Pembangunan Regional**

Salah satu aspek pembangunan regional adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi serta perubahan status kerja buruh karena itu konsep pembangunan regional sangat tepat bila didukung dengan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, teori pusat pertumbuhan dan pembangunan manusia.

Dari aspek ekonomi oleh Arsyad (1999:107) daerah mempunyai 3 pengertian yaitu:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budayanya, geografis, dan sebagainya, daerah ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah ini disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.

### **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Suatu daerah terbagi kedalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah. Misalnya daerah provinsi dalam wilayah tersebut masih terbagi atas berbagai sub wilayah seperti kabupaten atau kota. Pertumbuhan daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama yang antara lain: 1) sumber daya alam yang tersedia, 2) tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam, 3) adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang seperti transportasi, komunikasi, 4) tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam, dan 5) tersedianya kualitas sumber manusia untuk pengelolaan teknologi.

Sumber daya alam dapat berupa lahan pertanian, bahan tambang atau galian yang dapat mendukung industri pengolahan atau sumber daya alam lainnya yang akan mempunyai arti penting bagi daerah yang memilikinya. Daerah tersebut akan berspesialisasi dalam suatu sub sektor atau sektor dan akan mempunyai keuntungan absolut bagi daerah lainnya. Jika daerah tersebut dikelola secara baik dengan modal dan teknologi yang memadai maka daerah tersebut dapat diharapkan akan mengalami pertumbuhan dengan pesat.

Menurut pandangan Adam Smith bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat, jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Sukirno (1985: 19) menyebutkan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat perekonomian lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya dengan kata lain perkembangan akan tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Todaro (2000 : 111) menyatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, pertama : akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia, kedua; pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendiri membawa pertumbuhan angkatan kerja, ketiga; kemajuan teknologi.

## Konsep Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat diukur secara absolut maupun relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada tingkat minimum tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk tidak disebut miskin. Sedangkan kemiskinan relatif mengacu pada distribusi pendapatan.

Fenomena kemiskinan dalam masyarakat dapat dipandang dari beberapa aspek penyebabnya, di antaranya: a) kemiskinan berhubungan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat, sering disebut kemiskinan kultural. Dalam konteks ini kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja. b) Kemiskinan timbul sebagai akibat adanya ketidakadilan dalam pemilikan faktor-faktor produksi dalam masyarakat. Golongan yang memiliki akses kuat terhadap faktor-faktor produksi cenderung mendominasi dan melakukan ekspansi ekonomi yang kemudian menyisihkan golongan masyarakat pinggiran (peripheral). Akibatnya muncul kemiskinan struktural karena lemahnya kemampuan usaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. c) Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kekurangberuntungan (disadvantages), yaitu fisik yang lemah, kerentanan (vulnerability), keterisolasian, serta ketidakberdayaan (powerlessness).

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan apakah penduduk tergolong miskin atau tidak (garis kemiskinan/poverty line), di antaranya menggunakan indikator pengeluaran rata-rata per bulan yang mencukupi konsumsi makanan setara kalori tertentu per kapita, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pada dasarnya perspektif kemiskinan sangat luas, tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga meliputi dimensi sosio-kultural. Pada umumnya kemiskinan bergandengan erat dengan pengangguran dan pemukiman kumuh dan lingkungan yang tidak sehat. Karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki, baik skill, pendidikan maupun faktor produksi, kelompok ini kalah bersaing dalam memperebutkan pasar kerja, akibatnya banyak di antara mereka yang menjadi pengangguran. Karena pendapatan yang relatif rendah, menyebabkan berbagai kebutuhan yang paling pokok tidak bisa dipenuhi, seperti air bersih, fasilitas mandi cuci kakus yang sehat, fasilitas kesehatan dan lain-lain.

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, kemiskinan *ekstrim (extreme poverty)* atau kemiskinan absolut adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (*overall poverty*), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif, adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Penggolongan tipe kemiskinan lainnya adalah kemiskinan persisten, yaitu situasi di mana orang atau keluarga secara konsisten tetap miskin untuk masa yang relatif lama. Di Amerika, yang dimaksud dengan kelompok miskin persisten adalah mereka yang telah menerima tunjangan kesejahteraan selama lebih dari 8 tahun (Berrick, 1995; Pandji, 2001). Sedangkan kemiskinan transien adalah situasi di mana kehidupan orang atau keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi PHK, jatuh sakit dan peningkatan biaya pendidikan (Pandji, 2001). Kondisi kemiskinan transien ini dapat ditemui pada saat suatu negara dilanda krisis ekonomi atau bencana alam. Tinjauan lain mengenai kemiskinan adalah garis kemiskinan (*poverty line*) dan ukuran kemiskinan (*poverty measurement*), yang merupakan indikator kuantitatif untuk menentukan individu atau kelompok masyarakat miskin. Garis kemiskinan biasanya dihubungkan dengan standar hidup, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (barang dan jasa). Namun konsep ini masih terus diperdebatkan, khususnya dalam menentukan keluarga atau masyarakat yang perlu ditolong melalui program penanggulangan kemiskinan.

Selama ini data kemiskinan yang dipakai di Indonesia adalah yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Badan

Pusat Statistik (BPS) menggunakan kebutuhan dasar atau konsumsi keluarga untuk kemiskinan dan dikonversikan ke dalam rupiah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonversikan ukuran kemiskinan ke dalam 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kekurangan pakaian, rumah tinggal, kesehatan, pendidikan, bahan bakar dan keperluan transportasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian ekonomi pembangunan dan keuangan daerah yang membahas mengenai masalah yang berhubungan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim (Kota Induk) dengan Kota Prabumulih (Kota Baru). Periode waktu penelitian dalam 11 tahun terakhir yaitu 2000 sampai 2010.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dipergunakan diperoleh dari berbagai institusi terkait yang diakui secara sah atau legal untuk menerbitkan data yang diperlukan oleh masyarakat umum, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, dan Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih. Selain itu data juga diperoleh melalui studi pustaka dari beberapa literatur berupa buku teks, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Secara teoritis, pemekaran daerah mendorong lahirnya pemerintahan baru, yang pada gilirannya membutuhkan aparatur untuk menjalankannya. Dalam tugas menjalankan fungsi pemerintahan, aparatur berwenang untuk mengelola keuangan yang ada, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah. Hal ini harus dilakukan melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada akhirnya hal ini akan kembali kepada siklus keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi, juga kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik yang diterimanya

Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak ada pembanding yang setara. Oleh sebab itu dilakukan pula perbandingan antara daerah yang mekar dan daerah yang tidak melakukan pemekaran (prinsip treatment-control). Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan antara daerah induk dan DOB sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang terjadi di kedua daerah tersebut setelah pemekaran. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu propinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara umum kondisi daerah DOB, daerah induk, maupun daerah sekitarnya.

Untuk melihat kondisi atau dampak dari pemekaran daerah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan (*United Nations Development Programme*) UNDP (Juli 2008) melakukan penelitian dan salah satunya melihat dari kinerja perekonomian daerah. Fokus kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah atau tidak. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah :

- (1) Pertumbuhan PDRB Non-migas (LPE)  
Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.
- (2) PDRB per Kapita (Kap)  
Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
- (3) Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi (R/N)

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.

(4) Angka Kemiskinan (PM)

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan head-count index, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk. Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten  $i$  di tahun  $t$ , indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$IKE_{i,t} = \frac{(LPE_{i,t} + R/N_{i,t} + KAP_{i,t} + PM_{i,t})}{4}$$

Teknik analisis ini untuk melihat konsep dan evaluasi dampak dari pemekaran daerah Kabupaten/Kota, dan adapun definisi evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standard. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas tujuan pemekaran daerah itu sendiri, yang tertuang dalam PP 129/2000. Dalam Bab II pasal 2 disebutkan tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Perekonomian Kota Prabumulih

Dilihat dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Prabumulih pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan. maka untuk sektor pertambangan dan penggalian secara persentase cenderung mengalami penurunan. Sementara sumbangan sektor pertanian relatif stabil. Penurunan peranan pada sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Muara Enim dari sektor pertambangan dan penggalian ke sektor-sektor lainnya yaitu ke sektor sekunder seperti sektor industri dan ke sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kontribusi pertanian relatif kecil terhadap PDRB bertolak belakang dengan serapan tenaga kerja di sektor ini yang relatif tinggi. Sementara itu sektor pertambangan yang memiliki andil yang besar terhadap PDRB menyerap tenaga kerja yang relatif kecil, hal ini disebabkan sifat sektor pertambangan yang cenderung *capital intensive*. Hal ini perlu mendapat perhatian karena akan menimbulkan disparitas pendapatan antar sektor.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dalam menilai gambaran dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung merupakan gambaran dari tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Bagi daerah indikator ini akan menjadi pegangan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dari pembangunan yang telah dicapai dan untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun tercermin dari data PDRB berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya

peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila pertumbuhan negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian.

**Tabel 1. PDRB Kota Prabumulih Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000 – 2009**

No	Sektor	2000	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	92.874	17.056	110.697	114.653	119.052	121.789
2	Pertambangan&Penggalian	363.292	380.009	380.235	376.517	384.051	385.133
3	Industri Pengolahan	54.683	69.875	73.497	77.137	80.527	82.991
4	Listrik, Gas dan Air	2.292	2.600	2.693	2.750	2.805	2.916
5	Bangunan	82.499	114.428	122.782	131.872	143.823	155.086
6	Perdagangan, Hotel & Rest	163.362	311.003	233.579	253.238	269.945	282.819
7	Pengangkutan&Komunikasi	24.497	33.100	35.736	38.963	42.615	46.395
8	Bank dan Keuangan	72.276	96.172	105.583	118.996	129.101	140.273
9	Jasa-jasa	65.752	83.073	88.765	94.153	100.163	109.115
PDRB Dengan Migas		921.527	1.103.392	1.153.568	1.208.279	1.272.082	1.326.517
PDRB Non Migas		561.323	727.350	777.880	836.760	892.761	946.218

Sumber : BPS, PDRB Kota Prabumulih

Secara sektoral, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Prabumulih mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan kota Prabumulih sebelum pemekaran dimana pertumbuhan ekonomi kota Prabumulih pada tahun 1998 dalam struktur dengan migas negatif 6,96 persen. Setelah itu laju pertumbuhan merambat naik dengan 4,51 persen pada tahun 1999 dan meningkat pada tahun 2000 menjadi 7,08 persen. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dari 7,05 persen pada tahun 1999 menjadi 12,68 persen pada tahun 2000. Laju pertumbuhan industri pengolahan tumbuh dari 5,40 persen menjadi 6,08 persen diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air bersih dari 5,01 persen menjadi 8,67 persen. Setelah pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, laju pertumbuhan Kota Prabumulih pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM sebanyak dua kali pada tahun tersebut, namun dengan stabilnya harga BBM pada tahun 2007 pertumbuhan Kota Prabumulih meningkat kembali sebesar 4,74 persen. Sampai dengan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 5,32. Namun pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,24 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,28 persen, sebelumnya pada tahun 2008 sebesar 2,00 persen. Diikuti pula oleh penurunan lima sektor lainnya yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran serta Sektor Pengangkutan dan komunikasi. Hanya tiga sektor yang masih mengalami peningkatan pada laju pertumbuhannya yaitu Sektor Listrik, gas dan air minum, Sektor bank dan keuangan serta Sektor jasa-jasa. Tetapi dilihat dari nilai PDRB masih tetap menunjukkan peningkatan pada tahun 2009 tersebut.

Jika dilihat struktur ekonomi Kota Prabumulih sebelum pemekaran wilayah selama kurun waktu empat tahun terakhir mengalami perubahan, mengarah pada semakin kokohnya dominasi sektor pertambangan. Hal ini ditandai oleh peranan sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku yang semakin meningkat. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi hampir sama dengan sektor pertambangan dan penggalian sebelum masa krisis, yaitu sebesar 23,3 persen. Setelah krisis kontribusinya secara berfluktuasi cenderung mengecil hingga menjadi 21,17 persen pada tahun 2000. Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB, dengan kontribusi sekitar 18,7 persen sebelum masa krisis dan dalam perkembangannya terus menurun hingga 12,47 persen pada tahun 2000.



**Tabel 2. Tingkat Pertumbuhan PDRB Kota Prabumulih  
Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2001 – 2009**

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	2.96	1.91	2.98	3.06	3.52	3.40	3,57	3,84	2,30
2	Pertambangan&Penggalian	-0.87	2.04	3.19	0.97	-0.75	0.06	-0,98	2,00	0,28
3	Industri Pengolahan	3.29	4.85	5.25	5.81	5.94	5.18	4,95	4,39	3,06
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1.39	1.92	2.60	3.10	3.77	3.58	2,12	2,00	3,96
5	Bangunan	4.36	6.07	6.99	8.16	8.28	7.30	7,40	9,06	7,83
6	Perdagangan, Hotel & Rest	3.61	4.98	6.06	7.10	7.55	7.60	8,42	6,60	4,77
7	Pengangkutan&Komunikasi	3.90	5.21	5.60	7.07	9.33	7.96	9,03	9,37	8,87
8	Bank dan Keuangan	3.73	5.27	5.49	6.78	8.19	9.79	12,70	8,49	8,65
9	Jasa-jasa	2.67	4.93	5.59	4.62	6.17	6.85	6,07	6,83	8,48
PDRB DENGAN MIGAS		1.77	3.65	4.60	4.22	4.12	4.55	4,74	5,32	4,24
PDRB TANPA MIGAS		3.49	4.65	5.46	6.15	6.88	6.95	7,57	6,74	5,94

Sumber : BPS, PDRB Kota Prabumulih, data diolah

Setelah pemekaran wilayah, struktur perekonomian Kota Prabumulih masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian pada Tabel 4.4. yang menjadi penyumbang terbesar pada tahun 2009 yaitu sebesar 29,03 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya potensi sumber daya alam berupa migas yang dimiliki kota Prabumulih. Sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 21,32 persen pada tahun 2009.

**Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Kota Prabumulih  
Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2000 – 2009**

Sektor	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	8,42	9,28	9,16	9,01	8,97	9,18
Pertambangan & Penggalian	32,93	32,94	31,47	29,59	28,95	29,03
Industri Pengolahan	4,96	6,06	6,08	6,06	6,07	6,26
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,21	0,23	0,22	0,22	0,21	0,22
Bangunan	7,48	9,92	10,16	10,36	10,84	11,69
Perdagangan, Hotel & Rest	14,81	26,96	19,33	19,90	20,35	21,32
Pengangkutan & Komunikasi	2,22	2,87	2,96	3,06	3,21	3,50
Bank dan Keuangan	6,55	8,34	8,74	9,35	9,73	10,57
Jasa-jasa	5,96	7,20	7,35	7,40	7,55	8,23
PDRB Dengan Migas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, PDRB Kota Prabumulih, data diolah

Kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian kota Prabumulih diberikan oleh sektor bangunan sebesar 11,69 persen pada tahun 2009. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil hingga mencapai nilai di bawah 1 persen adalah sektor listrik, gas, dan air bersih.

Pergeseran kontribusi ini merupakan salah satu kemajuan positif untuk perkembangan perekonomian daerah perkotaan. Dapat dilihat bahwa sektor pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat sudah cukup stabil dan kuat untuk mendorong tahap perkembangan ekonomi selanjutnya.

Perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor bangunan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan mendorong tercapainya salah satu tujuan proses pembangunan yaitu perekonomian berbasis industri dan jasa terutama untuk daerah perkotaan.

Pendapatan perkapita mencerminkan secara umum pendapatan setiap penduduk dan lazim digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pendapatan per kapita Kota Prabumulih terus meningkat. Hal ini terjadi baik dari sektor migas maupun sektor non migas setelah pemekaran wilayah terlihat pada Tabel 2.6. Dengan migas pada tahun 2000 sebesar Rp. 7.739.827,00 menjadi Rp. 18.824.750,00 pada tahun 2009. Demikian pula pendapatan per per kapita tanpa migas pada tahun 2000 sebesar Rp 4.714.504,00 menjadi Rp. 6.867.301,00.

**Tabel 4. PDRB Per Kapita Kota Prabumulih  
Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2000 – 2009  
(Dengan Migas dan Tanpa Migas)**

Tahun	PDRB Per Kapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dengan Migas	PDRB Per Kapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas
	2000	7.739.827
2001	7.678.625	4.756.307
2002	7.758.527	4.852.252
2003	8.058.928	5.081.453
2004	8.172.484	5.248.479
2005	12.584.280	5.597.325
2006	13.821.364	5.859.646
2007	15.623.665	6.212.672
2008	18.448.188	6.555.320
2009	18.824.750	6.867.301

Sumber : BPS, PDRB Kota Prabumulih, data diolah

### **Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan**

Tingkat pengangguran di kota Prabumulih pada tahun 2007 mencapai 9,46 persen meningkat menjadi 10,42 persen pada tahun 2008. Angka ini pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 11,47.

Tingkat kesempatan kerja menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang tertampung dalam pasar kerja. Pada tahun 2007 tingkat kesempatan kerja sebesar 34,73, kemudian tahun 2008 menjadi 43,18 dan pada tahun 2009 sebesar 88,53. Kecenderungan untuk terus meningkat artinya dari 100 orang angkatan kerja di Prabumulih 86 orang yang telah bekerja. Ini berarti sebenarnya kesempatan kerja bertambah tetapi terjadi perubahan pada lapangan pekerjaan.

Struktur ekonomi kota Prabumulih bercirikan ekonomi pertanian. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian relatif dominan, yaitu sebesar 43,18 persen. Pada tahun 2008 menurun menjadi 39,28 persen dan tahun 2008 menurun menjadi 71,14 persen. Selanjutnya pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 38,71 persen. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran sebesar 9,46, kemudian tahun 2008 menjadi 10,42 dan pada tahun 2009 sebesar 88,53. Kecenderungan untuk terus meningkat terjadi seiring dengan menurunnya persentase orang yang bekerja di sektor primer pada tahun 2007 sebesar 43,18 persen, tahun 2008 menurun menjadi 39,28 persen dan tahun 2009 menurun lagi menjadi 38,71 persen. Demikian pula terjadi di sektor sekunder pada tahun 2008 orang yang bekerja sebanyak 13,93 persen, menurun menjadi 12,82 persen, dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 11,79 persen. Berbeda dengan sektor tersier yang mengalami peningkatan dari 41,07

persen, pada tahun 2008 meningkat menjadi 47,90 persen, kemudian pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 49,50 persen.

**Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Prabumulih Tahun 2007- 2009**

Lapangan Pekerjaan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sektor Primer (A)	44,48	39,88	48,47	48,47	44,49	38,71
Pertanian	39,67	34,73	43,18	43,18	39,28	38,71
Pertambangan	4,81	5,15	5,29	5,29	5,21	-
Sektor Sekunder (M)	13,28	12,29	8,64	8,64	7,61	3,26
Industri	6,43	6,37	3,05	3,05	2,97	3,26
Listik, Gas, Air	1,11	0,24	0,26	0,26	0,26	-
Bangunan	5,74	5,68	5,33	5,33	4,38	-
Sektor Tersier (S)	42,05	47,83	42,84	42,98	45,90	35,68
Perdagangan	28,63	23,70	18,77	18,91	19,55	24,35
Angkutan/Komunikasi	5,24	8,01	5,61	5,61	6,68	-
Keuangan	1,95	1,09	1,34	1,34	8,42	-
Jasa-jasa	6,43	15,03	17,12	17,12	13,25	-
Jumlah	100,00	100	100	100	100	100
N	50.823	50.805	52.787	52787	58.166	57.394

Sumber: BPS, Prabumulih Dalam Angka 2004-2010

Di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penduduk miskin menurun dari 1,45 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi 1,13 juta jiwa pada tahun 2008, atau berkurang sekitar 320 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin ( $P_0$ ), juga terlihat adanya penurunan, yaitu dari 20,99 persen pada tahun 2006 menjadi 15,68 persen pada tahun 2009. Jumlah penduduk miskin bervariasi antar kabupaten di Sumatera Selatan, dimana proporsi penduduk miskin pada tahun 2006 berkisar antara 9,23 persen (Palembang) hingga 35,52 persen (Musi Banyuasin). Distribusi penduduk tersebut pada tahun 2009 mengalami perubahan, dimana persentase terendah sebesar 9,95 dicapai oleh Kabupaten OKU Timur, sedangkan persentase terbesar, sebesar 22,76 dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin umumnya terjadi pada semua kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan.

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kota Prabumulih terus berkurang. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin mencapai 16,5 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 15,8 ribu jiwa, tahun 2005 mencapai 15,5 ribu jiwa dan tahun 2007 mencapai 10 ribu jiwa. Namun pada tahun 2008 meningkat menjadi 20,9 ribu jiwa, dan pada tahun 2009 berkurang menjadi 19,1 ribu jiwa. Jika pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim sebesar 9,33 persen, maka pada tahun 2007, 2008, dan 2009 masing-masing menjadi 15,39 persen dan 13,93 persen.

### **Perekonomian Daerah Kabupaten Muara Enim**

Prestasi ekonomi suatu daerah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu daerah, PDRB bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tapi juga membandingkannya dengan daerah lain.

Perekonomian Kabupaten Muara Enim secara umum masih menunjukkan perekonomian yang bercorak agraris dengan dominan di sektor primer atau berbasis sumberdaya alam.

Rinciannya secara sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. Di samping itu, dari angka PDRB selanjutnya dapat pula diperoleh ukuran turunannya (*derived measures*) seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita (Dumairy, 1997 : 37).

Perekonomian Kabupaten Muara Enim secara umum masih menunjukkan perekonomian yang bercorak agraris dengan dominan di sektor primer atau berbasis sumberdaya alam.

**Tabel 6. Pertumbuhan PDRB Dengan Migas Kabupaten Muara Enim  
Periode 1994 – 2010**

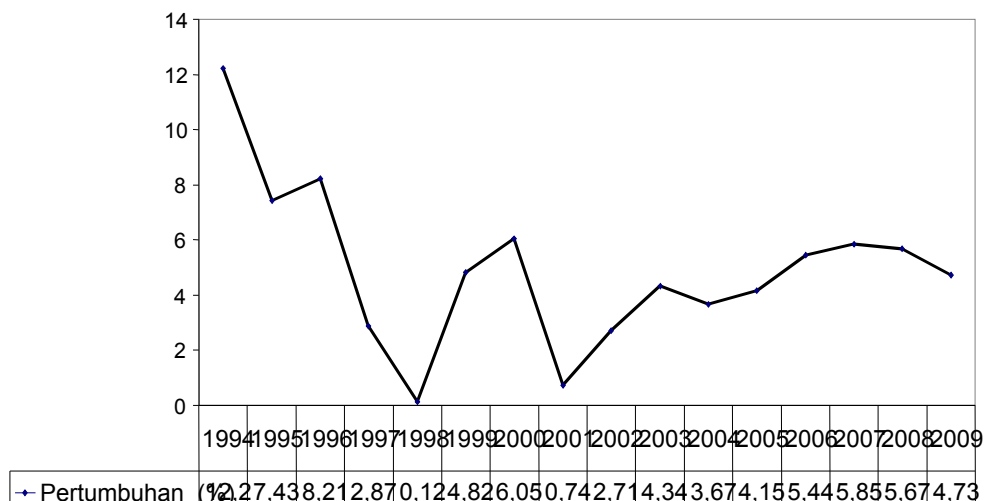
Tahun	Pertumbuhan (%)
1995	7,43
1996	8,21
1997	2,87
1998	0,12
1999	4,82
2000	6,05
2001	0,74
2002	2,71
2003	4,34
2004	3,67
2005	4,15
2006	5,44
2007	5,85
2008	5,67
2009	4,73
2010	5,34

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim

Keterangan : Tahun 1994 – 2000 berdasarkan harga konstan tahun 1993; Tahun 2001 – 2009 berdasarkan harga konstan tahun 2000

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dinyatakan dengan adanya kenaikan PDRB dari tahun ke tahun. Dengan demikian PDRB dapat juga dianggap sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi secara regional dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah senantiasa berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Hasilnya adalah ditandai dengan meningkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Masyarakat juga dituntut untuk turut berperan serta aktif mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.



**Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Dengan Migas Kabupaten Muara Enim Periode 1994 – 2009**

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim  
 Keterangan : Tahun 1994 – 2000 berdasarkan harga konstan tahun 1993  
 Tahun 2001 – 2009 berdasarkan harga konstan tahun 2000

Misalnya pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim hanya 0.12 persen karena pengaruh adanya krisis ekonomi di Indonesia yang mulai terjadi sejak Juli 1997 dan bahkan pada tahun 2001 perekonomian Kabupaten Muara Enim hanya mengalami peningkatan sebesar 0.74 persen. Hal ini karena pada tahun 2000 di Indonesia mulai dilaksanakannya otonomi daerah dan adanya perubahan tahun dasar dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun dasar 1993 menjadi tahun dasar 2000.

Akibat gejolak ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat ikut mempengaruhi perekonomian di suatu daerah. Berdasarkan Tabel 4.11. pada tahun 2002 dan 2003 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim telah mulai meningkat menjadi masing-masing sebesar 2.71, dan 4.34 persen sehingga sampai tahun 2007 pertumbuhannya sebesar 5.85 persen. Pada tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim cenderung menurun, yaitu mencapai 5,67 persen. Begitupula dengan tahun 2009 kembali mengalami penurunan menjadi 4,73 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim sebagai dampak terjadinya krisis global. Dampak dari krisis global menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, secara implisit berarti menurunnya permintaan dan daya beli dunia, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan penawaran dan menekan harga komoditas ekspor. Menurunnya permintaan dunia tersebut menyebabkan menurunnya ekspor Indonesia, termasuk komoditas pertanian di Kabupaten Muara Enim. Kemudian pada tahun 2010 terjadi kenaikan menjadi 5,34 persen.

Kedadaan perekonomian Kabupaten Muara Enim secara bervariasi terus mengalami pertumbuhan. Hanya kadang kala trend pertumbuhan ini tidak meningkat secara teratur, ini disebabkan berbagai macam gejolak ekonomi dan kebijakan yang kurang menguntungkan.

Sektor unggulan Kabupaten Muara Enim, meliputi sektor pertanian dan pertambangan (sektor primer). Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian adalah 10,26 persen dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 8,39 dan turun kembali menjadi 6,08 persen pada tahun 2009. Sementara itu pada tahun 2007 sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 3,80 persen dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 3,82 persen dan pada tahun 2009 melambat menjadi 3,25 persen. Kemudian pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 3,27 persen.

Sektor pertanian merupakan tumpuan Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena masih tersedianya lahan yang memadai serta layak untuk menjadi areal perkebunan, perikanan dan hortikultura.

Bila dilihat sumbangan antarsektor ekonomi tampak bahwa pada tahun 2007 sumbangan sektor pertambangan dan penggalian sekitar 56,43 persen dan tahun 2008 sektor pertambangan dan penggalian ini memberikan sumbangan sekitar 55,45 persen, tahun 2009 menjadi 54,66 persen, dan

tahun 2010 menjadi 53,59 persen atau selama periode 2007 – 2010 rata-rata memberikan sumbangan sekitar 55,54 persen.

Sementara itu pada periode yang sama sektor pertanian memberikan sumbangan rata-rata sekitar 19,54 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode 2007–2010 perekonomian Kabupaten Muara Enim masih sangat tergantung kepada sektor primer (sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian).

Dari sumbangan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muara Enim bila dilihat perkembangannya selama kurun waktu 2007–2010, maka untuk sektor pertambangan dan penggalian secara persentase cenderung mengalami penurunan. Sementara sumbangan sektor pertanian relatif stabil. Penurunan peranan pada sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Muara Enim dari sektor pertambangan dan penggalian ke sektor-sektor lainnya yaitu ke sektor sekunder seperti sektor industri dan ke sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kontribusi pertanian relatif kecil terhadap PDRB bertolak belakang dengan serapan tenaga kerja di sektor ini yang relatif tinggi. Sementara itu sektor pertambangan yang memiliki andil yang besar terhadap PDRB menyerap tenaga kerja yang relatif kecil, hal ini disebabkan sifat sektor pertambangan yang cenderung *capital intensive*. Hal ini perlu mendapat perhatian karena akan menimbulkan disparitas pendapatan antar sektor.

**Tabel 7. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim  
Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2001 – 2010**

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	4.53	6.1	6.34	6.33	9.06	10.19	10,20	8,39	6,08	7,25
2	Pertambangan&Penggalian	-1.43	0.99	3.3	2.18	2.01	3.48	4,05	3,82	3,25	3,27
3	Industri Pengolahan	5.1	6.02	7.44	6.46	6.49	7.11	7,38	7,00	5,27	6,38
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	-1.41	1.63	2.38	2.62	3.7	4.98	5,15	5,26	5,21	6,45
5	Bangunan	6.26	6.73	6.74	6.84	6.92	7.42	8,14	8,31	8,56	9,29
6	Perdagangan, Hotel & Rest	5.48	5.53	5.82	6.32	6.39	7.61	8,37	7,53	5,98	8,86
7	Pengangkutan &Komunikasi	4.2	4.67	5.51	6.18	6.33	7.02	7,17	8,53	8,17	9,72
8	Bank dan Keuangan	3.6	4.92	4.47	4.86	5.02	5.28	5,34	7,73	7,84	8,12
9	Jasa-jasa	2.63	3.96	2.87	3.42	4.82	5.13	5,21	9,11	9,34	9,85
PDRB Total		0.74	2.71	4.34	3.67	4.15	5.44	5,85	5,67	4,73	5,34

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim

Jika dirinci menurut sektor maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2001 - 2010 berdasarkan harga konstan tahun dasar 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.11. Bila diamati lebih jauh, pertumbuhan sektor di Kabupaten Muara Enim cukup bervariasi. Ada beberapa sektor yang memiliki laju pertumbuhan rata-rata relatif tinggi, seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, bank dan keuangan serta sektor jasa-jasa.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas pembangunan yang tinggi di Kabupaten Muara Enim, sehingga sektor-sektor ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam periode tahun 2001 - 2010 berdasarkan data tersebut diketahui sektor pertanian mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian adalah 4,53 persen dan pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 6,10 persen. Pada tahun 2007 sektor pertanian tumbuh sebesar 10,26 persen, namun pada tahun 2009 cenderung menurun menjadi 6,08 persen, akibat krisis global. Namun pada tahun 2010 pertumbuhannya meningkat lagi menjadi 7,25 persen. Sementara itu pada tahun 2001 pertumbuhan sektor pertambangan mencapai minus, meningkat menjadi 4,05 persen pada tahun 2007 dan turun menjadi 3,27 persen pada tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode 2001 – 2010 perekonomian Kabupaten Muara Enim masih sangat tergantung kepada sektor primer (sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian), dimana kontribusi kedua sektor tersebut sebesar 61,04 persen.

**Tabel 8. Distribusi PDRB Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 – 2010 Berdasarkan Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha**

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rerata
1	Pertanian	15,62	16,14	16,45	16,87	17,66	18,45	19,22	19,72	19,97	20,33	14,15
2	Pertambangan&Penggalian	62,42	61,37	60,76	59,88	58,65	57,55	56,43	55,45	54,66	53,59	46,89
3	Industri Pengolahan	6,88	7,10	7,31	7,51	7,68	7,81	8,00	8,0	8,04	8,12	6,05
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,36
5	Bangunan	3,32	3,45	3,52	3,63	3,73	3,80	3,88	3,98	4,13	4,28	2,99
6	Perdagangan, Hotel & Rest	4,58	4,71	4,77	4,89	5,00	5,10	5,22	5,31	5,38	5,56	4,53
7	Pengangkutan&Komunikasi	1,25	1,28	1,29	1,32	13,50	1,37	1,39	1,43	1,48	1,54	2,30
8	Bank dan Keuangan	1,16	1,18	1,18	1,20	1,21	1,20	1,21	1,23	1,27	1,30	0,19
9	Jasa-jasa	4,36	4,37	4,31	4,30	4,33	4,31	4,34	4,48	4,68	4,88	4,00
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim

Dari sumbangan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Muara Enim bila dilihat perkembangannya selama kurun waktu 2001 – 2010, maka untuk sektor pertambangan dan penggalian secara persentase cenderung mengalami penurunan. Penurunan peranan pada sektor ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Muara Enim dari sektor pertambangan dan penggalian ke sektor-sektor lainnya yaitu ke sektor sekunder seperti sektor industri dan ke sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dari gambaran perkembangan sumbangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Muara Enim dapat disimpulkan bahwa peranan sektor ekonomi di luar sektor pertambangan dan penggalian diduga masih akan tetap menandai perkembangan ekonomi di Kabupaten Muara Enim di tahun-tahun mendatang.

**Tabel 9. PDRB Per Kapita Kabupaten Muara Enim Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000 – 2010 (Dengan Migas dan Tanpa Migas)**

Tahun	PDRB Per Kapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dengan Migas	PDRB Per Kapita (Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas
	2000	9.667.374
2001	9.490.976	6.668.061
2002	9.611.663	6.089.016
2003	9.907.497	6.961.463
2004	10.097.436	6.107.393
2005	10.346.438	6.264.996
2006	19.596.201	6.530.690
2007	22.602.389	6.883.938
2008	27.126.311	7.268.958
2009	26.814.463	7.637.512
2010	27.849.317	7.644.520

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Muara Enim, data diolah

Mencermati lebih jauh andil masing-masing sektor selama kurun waktu 2001 - 2010, terlihat bahwa untuk sektor primer yang mendominasi terhadap pembentukan PDRB, andil rata-rata terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 46,89 persen, sisanya sebesar 14,15 persen berasal dari sektor pertanian. Sementara untuk sektor sekunder, andil yang terbesar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 6,05 persen, dan sisanya berasal dari sektor bangunan dan dari sektor listrik, gas dan air minum masing-masing sebesar 3,65 persen dan 0.40 persen. Sedangkan untuk sektor tersier, andil terbesar berasal

dari sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata sebesar 4,97 persen, sementara sektor lainnya seperti sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan hanya memberi andil masing-masing sebesar 4,39 persen; 3,07 persen dan 1,20 persen.

Pendapatan perkapita Kabupaten Muara Enim mencerminkan secara umum pendapatan setiap penduduk dan lazim digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Muara Enim tersebut. Selama kurun waktu sebelas tahun terakhir, pendapatan per kapita Kabupaten Muara Enim terus meningkat. Hal ini terjadi baik dari sektor migas maupun sektor non migas setelah pemekaran wilayah. Dengan migas pada tahun 2000 sebesar Rp. 9.667.374,00 menjadi Rp. 27.849.317,00 pada tahun 2010. Demikian pula pendapatan per per kapita tanpa migas pada tahun 2006 sebesar Rp 6.611.011,00 menjadi Rp. 7.644.520,00.

### **Angka Pengangguran dan Kemiskinan**

Angka pengangguran terbuka di Muara Enim pada tahun 2007 mencapai 7,89 persen, turun menjadi 6,37 pada tahun 2008. Angka ini pada tahun 2009 menurun menjadi 5,40 persen atau 17.271 orang. Angka pengangguran pada penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 5,71 persen pada penduduk laki-laki dan 4,93 persen untuk penduduk perempuan.

Pada tahun 2009 tingkat setengah pengangguran sebesar 47,42. Angka ini cenderung turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pada tahun 2008 besarnya 47,5 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 45,88. Artinya dari setiap 100 angkatan kerja yang sudah bekerja sebanyak 47 sampai 45 orang mempunyai jam kerja yang relatif rendah (kurang dari 35 jam per minggu).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2009 sebesar 70,42, dimana untuk laki-laki sebesar 84,73 dan perempuan sebesar 55,64. Angka TPAK tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2008 mencapai 72,09, sedangkan pada tahun 2007 sebesar 73,05. Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah melihat TPAK penduduk perempuan. TPAK laki-laki bersifat universal, karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2007 sebesar 58,20 dan pada tahun 2008 sebesar 58,70 serta tahun 2009 menurun menjadi 55,64.

Permasalahan ketenagakerjaan lainnya yang dihadapi Kabupaten Muara Enim adalah tingginya angka pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. Angka pengangguran terdidik didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap angkatan kerja pada kelompok tersebut. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran pada penduduk yang tamat SLTA sebesar 11,06. Berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja berpendidikan SLTA sebanyak 11 sampai 12 orang diantaranya sedang menganggur. Pada tahun 2007 angka tersebut lebih besar lagi, yaitu sebesar 20,87, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 9,32.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran terdidik. Salah satunya adalah kemungkinan dengan pendidikan yang tinggi, mereka merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya untuk bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal sektor sektor tersebut ketersediaannya terbatas, sehingga mereka terpaksa menganggur. Mereka yang termasuk kelompok penganggur terdidik diduga adalah para pencari kerja usia muda atau pencari kerja pertama kali yang tamat pendidikan sekolah.



**Tabel 10. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2007- 2009**

Lapangan Pekerjaan	2007	2008	2009
Sektor Primer (A)	76,65	73,19	72,58
Pertanian	74,14	71,14	71,42
Pertambangan	2,51	2,05	1,16
Sektor Sekunder (M)	3,59	3,26	4,63
Industri	0,96	1,07	2,43
Listik, Gas, Air	0,8	0,96	0,57
Bangunan	1,83	1,23	1,63
Sektor Tersier (S)	19,76	23,55	22,79
Perdagangan	8,06	9,8	8,32
Angkutan/Komunikasi	4	3,4	4,66
Keuangan	0,33	0,91	0,3
Jasa-jasa	7,37	9,44	9,51
Jumlah	100.00	100	100
N	295.682	300.581	301.970

Sumber: BPS, diolah dari data Sakernas 2007-2009.

Tingkat kesempatan kerja menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang tertampung dalam pasar kerja. Pada tahun 2006 tingkat kesempatan kerja sebesar 91,56, kemudian tahun 2007 menjadi 92,11 dan pada tahun 2008 sebesar 93,63. Kecenderungan untuk terus meningkat terjadi juga pada tahun 2009, dimana angka kesempatan kerja menjadi 94,60. Artinya dari 100 orang angkatan kerja di Muara Enim 94 orang diantaranya telah bekerja.

Struktur ekonomi kabupaten Muara Enim bercirikan ekonomi pertanian. Pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian relatif dominan, yaitu sebesar 74,42 persen. Pada tahun 2007 menjadi 74,14 persen dan tahun 2008 menurun menjadi 71,14 persen. Selanjutnya pada tahun 2009 meningkat menjadi 71,42 persen. Pada tahun 2006 tingkat kesempatan kerja sebesar 91,56, kemudian tahun 2007 menjadi 92,11 dan pada tahun 2008 sebesar 93,63. Kecenderungan untuk terus meningkat terjadi juga pada tahun 2009, dimana angka kesempatan kerja menjadi 94,60.

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim terus berkurang. Pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin mencapai 150,5 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 140, 7 ribu jiwa, tahun 2007 mencapai 128,5 ribu jiwa dan tahun 2008 mencapai 118,4 ribu jiwa. Jika pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim sebesar 21,88 persen, maka pada tahun 2007, 2008, dan 2009 masing-masing menjadi 19,87 persen, 17,98 persen dan 15,96 persen.

### Analisis dan Pembahasan

Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut. Seperti halnya dengan Kota Prabumulih sebagai kota yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Dengan menggunakan analisis kinerja ekonomi daerah maka diketahui perubahan ke arah kemajuan yang signifikan pada Kota Prabumulih setelah dimekarkan. Kemudian dilakukan perbandingan dengan Kabupaten Muara Enim sebagai kota induk. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan rata-rata daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara umum kondisi daerah DOB, daerah induk, maupun daerah sekitarnya.

Dari hasil Indeks Kinerja Ekonomi antara Kabupaten Muara Enim sebagai kabupaten Induk dengan Kota Prabumulih sebagai kota yang pemekaran menunjukkan bahwa perkembangan dalam kurun waktu 2000-2009. Kota yang baru mengalami pemekaran menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun dilihat dari perhitungan indeks kinerja ekonomi daerah (IKE) adalah rata-rata kinerja ekonomi kota Prabumulih masih lebih rendah yaitu 1,55 bila dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim yaitu 1,72. Bila dilihat indeks kemiskinan di Kota Prabumulih ternyata menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim.

**Tabel 11. Kinerja Ekonomi atas PDRB dari Kabupaten/Kota Baru dan Induk Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) Tahun 2009**

Kabupaten/Kota	LPE	Rasio PDRB Terhadap PDRB Provinsi (R/N)	PDRB Perkapita (KAP)	Indeks Kemiskinan (PM)	Indeks Kinerja Ekonomi
	2001-2009				
Muara Enim	4,51	7,11	7.637.512	15,96	1.72
Prabumulih	5,21	2.12	6.867.301	13,39	1.55

Sumber : Data diolah

### Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah

Apabila kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi pada masa pemekaran semakin membaik maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, antara lain dicerminkan dari angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta rata-rata pengeluaran riil. Berdasarkan tiga kelompok indikator (kesehatan, pendidikan, dan pendapatan) kualitas hidup masyarakat tersebut secara akumulasi akan diperoleh nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Perubahan kualitas hidup yang terjadi antara daerah induk yaitu Kabupaten Muara Enim dengan daerah baru yaitu Kota Prabumulih dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Angka harapan hidup daerah induk (Kabupaten Muara Enim) tahun 2004 mencapai 65,8 tahun sedangkan daerah baru (Kota Prabumulih) telah mencapai 69,5 tahun. Pada tahun 2009 angka harapan hidup mengalami peningkatan, yakni daerah induk menjadi 67,47 tahun dan daerah baru menjadi 71,51 tahun. Perubahan/kenaikan angka harapan hidup ini merupakan cerminan dari perubahan hidup masyarakat yang lebih sehat.

Angka melek huruf, tahun 2004 daerah induk sebesar 98,8 persen, sedangkan daerah baru hanya sebesar 97,5 persen. Kemudian pada tahun 2009, daerah baru meningkat menjadi 98,66 persen sedangkan daerah induk menjadi sebesar 98,81 persen.

Rata-rata lama sekolah daerah induk tahun 2004 adalah 7,2 tahun sedangkan di daerah baru 8,3 tahun. Kemudian tahun 2009 daerah induk meningkat menjadi 7,3 tahun seperti halnya dengan daerah baru yang meningkat menjadi 9 tahun. Hal ini menggambarkan keberhasilan daerah baru dalam memperhatikan masalah pendidikan sehingga masyarakat lebih lama dalam kegiatan belajarnya.

Rata-rata pengeluaran riil per kapita, tahun 2004 untuk daerah induk sebesar Rp. 595,5 sementara daerah baru Rp. 596,8 pada tahun yang sama. Kemudian pada 2009 rata-rata pengeluaran riil per kapita daerah induk meningkat menjadi Rp. 611,60,0 sedangkan daerah baru mengalami peningkatan relatif hampir sama menjadi sebesar Rp.610,06.

Berdasarkan empat indikator tersebut, tampak peningkatan pencapaian angka IPM yang berbeda. Pada tahun 2004 daerah baru memperoleh angka IPM relatif lebih tinggi 70,7 dibandingkan daerah induk 68,1. Sampai dengan tahun 2009 angka IPM relatif lebih tinggi 73,69 dibandingkan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah induk 70,38 Ini berarti menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi bagi daerah baru dibandingkan dengan peningkatan daerah induk. (Tabel 4.16)

**Tabel 12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim (Kabupaten Induk) Dibanding Kota Prabumulih (Kota Baru) Tahun 2004-2009**

IPM	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Prabumulih	70,7	71,1	71,7	72,51	73,20	73,69
Muara Enim	68,1	68,7	69,14	69,42	69,91	70,38

Sumber data :BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan, 2004-2009

## PENUTUP

### Kesimpulan

dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 memberikan peluang bagi daerah baru untuk menggali kemampuannya untuk menjadi daerah yang mandiri dan berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Kota Prabumulih sebagai kota yang mengalami pemekaran dari kabupaten Muara Enim. Kota Prabumulih telah menunjukkan perubahan bila dilihat dari analisis menggunakan Indek Ekonomi Daerah memang masih belum sebaik daerah induk (Kabupaten Muara Enim). Namun bila dilihat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia ternyata Kota Prabumulih mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada daerah induk.

### Saran-Saran

1. Perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendukung aspek-aspek yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan serta peningkatan pendapatan per kapita sebagai unsur-unsur yang penting dalam menilai kinerja perekonomian daerah tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- A. Dwiyanto (Editor), 2003, *Laporan Penelitian. World Bank*, PSKEK-UGM, Yogyakarta. 2003.
- Arsyad, Lincolin, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1993, *Pengantar Perencanaan Ekonomi*, Media Wedy, Mandala, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2000-2009, *Database Berbagai Edisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2002, *Studi Analisis Kemiskinan Tahun 2001 (Draft)*, Bappenas, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nations Development Programme, 2007, *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*, Jakarta.
- Dumairy, 2008, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Hakim, Abdul, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, EKONOSIA, FE UII, Yogyakarta.

- HJ. deBlij, et all. In: *Geography, Regions and Concepts*, John Wiley and Son Inc. Canada, 1992.
- Ismail, Munawar, 1995, *Pertumbuhan dan Pemerataan : Analisa dan Bukti Empirik*, Prisma No.1 Tahun XXIV, Januari, Jakarta.
- Jinghan,M.L., 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerbit Pajar Interpratama, Jakarta
- Kuncoro, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, FE-UGM Yogyakarta, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, FE-UGM Yogyakarta, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M, 2006. *Ekonomika Pembangunan*, Edisi ke 4. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw, G, 2003, *Teori Makroekonomi*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Panji Indra. 2001. *An Analysis Towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia*. Philosophy Doctor Dissertation. Faculty of the School Policy, Planning, and Development. University of Southern California, California.
- Panorama, Maya, 2002, *Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Sumatera Selatan*, Tesis (tidak dipublikasikan), PPS Universitas Sriwijaya.
- Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, 2000, *Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Sumatera Selatan 2000-2004*, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Palembang
- P3EM FE-Unsri, 2006. *Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Muara Enim*  
 ..... PP Nomor 129 tahun 2000  
 ..... PP Nomor 78 tahun 2007  
 ..... <http://www.slideshare.net/dadangsolihin>, *Otonomi Daerah dalam perspektif teori kebijakan dan praktek*
- Rahayu, S., Sondi, K., dan Adang, R. 2000. *Analisa Pemerataan Pendapatan Usaha ternak Sapi Perah Rakyat (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya)*. Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Sumedang.
- Richardson, W, 1973, *Regional Growth Theory*, Micmillan Press Ltd. London.
- Rosario G. M, Ruben G. M, 1999, *Regional Economic Growth and Convergence in the Philippines*, Philippine Institute for Development Studies, Philippina.
- Sjafrizal, 2002, *Teori Pertumbuhan Ekonomi regional dan Metode Analisis*, (Bahan Kuliah), Palembang.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Era Otonomi*, (Bahan Kuliah), Medan 2002.
- Susanti, H., Moh.Iksan dan Widyanti, 2000, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suryanto, Joko dan Soesilawati, Endang, 2008. *Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Empat Provinsi Pemekaran*
- Tambunan, Tulus, 2003, *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, Edisi Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, Michael, 2000, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.  
 -----, 2004, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.